

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Secara geografis Kota Palopo terletak antara 2o53'15" – 3o04'08" Lintang Selatan dan 120o03'10"– 120o14'34" Bujur Timur, Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu
- b. Sebelah Timur dengan Teluk Bone
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja.

Letak wilayah kota palopo sangat unik karna terletak ditengah antara Kabupaten Luwu Kecamatan bua dan Kecamatan Walenrang. Luas wilayah Kota Palopo tercatat 247,52 km persegi yang meliputi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan antara lain :

1. Kecamatan Wara Selatan yang terdiri dari 4 kelurahan,
2. Kecamatan Sendana ada 4 kelurahan

3. Kecamatan Wara dengan 6 Kelurahan,
4. Kecamatan Wara Timur dengan 7 Kelurahan,
5. Kecamatan Mungkajang dengan 4 Kelurahan
6. Kecamatan Wara Utara dengan 6 Kelurahan
7. Kecamatan Bara dengan 5 Kelurahan
8. Kecamatan Telluwanua dengan 7 Kelurahan
9. Kecamatan Wara Barat dengan 5 Kelurahan

Jarak antara Kota Palopo ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar adalah 390 km. Jarak seluruh ibukota kecamatan ke ibukota Kota Palopo semua relative dekat, berkisar antara 1 – 5 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12.00 km. kota Palopo sendiri memiliki 11 Puskesmas diantaranya :

1. Puskesmas Wara
2. Puskesmas Pontap
3. Puskesmas Benteng
4. Puskesmas Wara Selatan
5. Puskesmas Sendana
6. Puskesmas Mungkajang
7. Puskesmas Wara Utara
8. Puskesmas Bara Permai
9. Puskesmas Wara Utara Kota

10. Puskesmas Maroangin

11. Puskesmas Wara Barat

Dan terdapat 7 Rumah Sakit di antaranya :

1. RSUD Sawerigading

2. RS At- Medika

3. RS Bintang Laut

4. RS. Dr. Pallemai Tandi

5. RS Mega Buana

6. RS Mujaisyah

7. RS St. Madyang

2. Keadaan Demografi

Secara demografi Penduduk Kota Palopo pada akhir 2022 tercatat sebanyak 180.678 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 87.812 jiwa laki-laki dan 92.866 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 94,56, angka ini menunjukkan pada 100 penduduk perempuan ada 94 – 95 penduduk laki-laki. Dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 ke 2018 sebanyak 2,13 %. memiliki luas daerah 247,52 Km dengan kepadatan penduduknya di Kota Palopo yaitu 730 jiwa per Kilometer persegi. Kecamatan yang kepadatan penduduknya paling tinggi yakni Kecamatan Wara dengan 3.403 jiwa/km persegi. kemudian kecamatan yang memiliki kepadatan penduduknya terendah ialah kecamatan Mungkajang yaitu 151 jiwa/ km persegi.

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Karakteristik umum responden merupakan ciri khas yang melekat pada diri responden. Karakteristik responden yang ditampilkan meliputi Umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan

a. Umur

Tabel 5 1
Distribusi Frekuensi Umur Masyarakat BPJS Mandiri
di Wilayah Kerja Kota Palopo

Umur	n	%
17 – 25 tahun	3	3
26 – 45 tahun	71	71
>45 tahun	26	26
Total	100	100

Sumber : Data Primer 2023

Berdasarkan Tabel 5.1 bahwa 100 yang menjadi sampel penelitian terbanyak pada kelompok umur 26-45 tahun sebanyak 71 responden (71.0 %) dan paling sedikit kelompok umur 17-25 tahun sebanyak 3 orang (3.0%)

b. Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 5.2 bahwa 100 yang menjadi responden penelitian jenis kelamin terbanyak adalah jenis kelamin perempuan sebanyak 83 orang (83.0%) dan yang paling sedikit yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang atau setara dengan (17.0%).

Tabel 5 2
Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Masyarakat
BPJS Mandiri di Wilayah Kerja Kota Palopo

Jenis Kelamin	n	%
Laki- Laki	17	17
Perempuan	83	83
Total	100	100

Sumber : Data Primer 2023

c. Pekerjaan

Tabel 5 3
Distribusi Frekuensi Pekerjaan Masyarakat BPJS
Mandiri di Wilayah Kerja Kota Palopo

Pekerjaan	n	%
IRT	21	21
Pedagang/ Wiraswasta	27	27
Karyawan Swasta	45	45
Dan lain-lain	7	7
Total	100	100

Sumber : Data Primer 2023

Berdasarkan tabel 5.3 bahwa 100 yang menjadi responden penelitian pekerjaan terbanyak adalah Karyawan swasta sebanyak 45 orang (45.0%) dan yang paling sedikit yaitu dan lain-lain yang dimana ada yang sebagai tukang ojol,tukang becak,pelaut sebanyak 7 orang (7.0%).

d. Pendidikan terakhir

Tabel 5 4
Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Masyarakat
BPJS Mandiri di Wilayah Kerja Kota Palopo

Pendidikan	n	%
SD	17	17
SMP	16	16
SMA	39	39
D3/S1	28	28
Total	100	100

Sumber : Data Primer 2023

Berdasarkan tabel 5.4 bahwa 100 yang menjadi responden penelitian pendidikan terakhir terbanyak yaitu SMA dengan frekuensi 39 yang setara dengan (39.0%) sedangkan pendidikan yang paling sedikit yaitu SD dengan frekuensi 17 atau setara dengan (17.0%).

2. Hasil Analisis Univariat

Yang menjadi analisa univariat dalam penelitian ini, yakni pendapatan per-bulan, pengeluaran, jumlah anggota keluarga, persepsi terhadap mutu pelayanan kesehatan, riwayat katastropik, *ability to pay* (Kemampuan membayar), dan *willingness to pay* (Kemauan membayar)

1. Pendapatan Per bulan

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 100 peserta mandiri yang menjadi responden, yang termasuk dalam kategori memiliki pendapatan tinggi sebanyak 53 responden (53,0%) dan

responden yang berpendapatan rendah sebanyak 47 responden (47,0%).

Tabel 5 5
Distribusi Frekuensi responden berdasarkan pendapatan Masyarakat BPJS Mandiri di Wilayah Kerja Kota Palopo

Pendapatan	n	%
≥ Rp3.529.100,-	53	53
< Rp3.529.100,-	47	47
Total	100	100

Sumber : Data Primer 2023

2. Pengeluaran Per bulan

Tabel 5 6
Distribusi Frekuensi responden berdasarkan pengeluaran Masyarakat BPJS Mandiri di Wilayah Kerja Kota Palopo

Pengeluaran	n	%
≥Rp3.164.500,-	47	47
<Rp3.164.500,-	53	53
Total	100	100

Sumber : Data Primer 2023

Berdasarkan tabel 5.6 dari 100 yang menjadi responden dalam penelitian ini yang termasuk memiliki pengeluaran tertinggi itu sebanyak 53 responden (53,0%) dan sebanyak 47 responden yang memiliki pengeluaran yang paling rendah (47,0%).

3. Jumlah Anggota Keluarga

Berdasarkan tabel 5.7 dari 100 yang menjadi responden dalam penelitian ini yang termasuk memiliki jumlah anggota keluarga lebih

dari 3 yaitu sebanyak 60 responden (60,0%) dan yang memiliki responden kurang dari 3 yaitu sebanyak 40 responden (40,0%).

Tabel 5 7
Distribusi Frekuensi responden berdasarkan pengeluaran Masyarakat BPJS Mandiri di Wilayah Kerja Kota Palopo

Jumlah Anggota Kel.	n	%
> 3 anggota Keluarga	60	60
≤ 3 anggota keluarga	40	40
Total	100	100

Sumber : Data Primer 2023

4. Persepsi Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan

Tabel 5 8
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Persepsi Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat BPJS Mandiri di Wilayah Kerja Kota Palopo

Persepsi terhadap mutu pelayanan kesehatan	n	%
Kurang Baik	27	27
Baik	73	73
Total	100	100

Sumber : Data Primer 2023

Berdasarkan tabel 5.8 dari 100 yang menjadi responden dalam penelitian ini yang termasuk dalam persepsi baik yaitu sebanyak 73 responden atau setara dengan (73.0%) dan yang termasuk dalam persepsi kurang baik itu sebanyak 27 responden atau setara dengan (27%).

5. Riwayat Katastropik

Tabel 5 9
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Riwayat
Katastropik Masyarakat BPJS Mandiri
di Wilayah Kerja Kota Palopo

Riwayat Katastropik	n	%
Ada	73	73
Tidak Ada	27	27
Total	100	100

Sumber:Data Primer 2023

Berdasarkan tabel 5.9 dari 100 yang menjadi responden hanya 73 responden yang memiliki riwayat katastrofik (73.0%) dan sebanyak 27 responden yang tidak memiliki riwayat katastrofik (27,0%).

6. Kemampuan Membayar

Tabel 5 10
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan
Kemauan Masyarakat BPJS Mandiri
di Wilayah Kerja Kota Palopo

Kemampuan Membayar	n	%
Tidak Mampu	22	22
Mampu	78	78
Total	100	100

Sumber:Data Primer 2023

Berdasarkan tabel 5.10 dari 100 yang menjadi responden hanya 22 yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar iuran BPJS atau setara dengan (22.0%) dan yang memiliki Kemampuan untuk membayar sebanyak 78 responden atau setara dengan (78.0%).

7. Kelas Rawat luran BPJS

Tabel 5 11
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelas
Rawat luran BPJS Masyarakat BPJS Mandiri
di Wilayah Kerja Kota Palopo

WTP	n	%
Kelas I	32	32
Kelas II	40	40
Kelas III	28	28
Total	100	100

Sumber:Data Primer 2023

Berdasarkan tabel 5.11 di atas, menunjukkan bahwa dari 100 responden, terdapat 32 responden (32%) termasuk kategori kelas rawat I, 40 responden (40.0%) termasuk kategori kelas II dan 28 (28.0%) responden termasuk kategori kelas rawat III

8. Kemauan Membayar

Tabel 5 12
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan
Kemauan Masyarakat BPJS Mandiri
di Wilayah Kerja Kota Palopo

Kemauan Membayar	n	%
Tidak	33	33
Ya	67	67
Total	100	100

Sumber:Data Primer 2023

Berdasarkan tabel 5.12 di atas, menunjukkan bahwa dari 100 responden, terdapat 67 responden (67.0%) yang memiliki kemauan

untuk membayar dan sebanyak 33 responden (33.0%) yang tidak memiliki kemauan untuk membayar iuran bpjs kesehatan mandiri.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Adapun hasil analisis bivariat dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel serta uraian di bawah ini :

1. Hubungan ATP

1. Analisis hubungan pendapatan per-bulan terhadap Kemampuan Membayar (Ability To Pay)

Berdasarkan tabel 5.13 tentang hubungan tingkat pendapatan terhadap kemampuan membayar (ability to pay) iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri di Kota Palopo diketahui bahwa dari 78 responden peserta mandiri BPJS Kesehatan yang memiliki kemampuan membayar terdapat 51 responden yang berpendapatan tinggi setara dengan (96.2%) dan 2 responden yang berpendapatan rendah atau setara dengan (3.8%), sementara itu, terdapat 22 responden peserta BPJS Kesehatan yang tidak memiliki kemampuan iuran BPJS Kesehatan, terdapat 2 responden yang berpendapatan tinggi atau setara dengan (3.8%) dan 20 responden yang berpendapatan rendah atau setara dengan (42.6%).

Berdasarkan nilai uji statistic *chi-square*, diperoleh nilai $p = 0,000$ ($p = 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima H_0 ditolak. Jadi, terdapat

hubungan pendapatan per bulan terhadap kemampuan membayar (ability to pay) iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri di Kota Palopo.

Tabel 5 13
Pengaruh pendapatan per bulan terhadap Kemampuan
membayar Masyarakat BPJS Mandiri
di Wilayah Kerja Kota Palopo

Pendapatan	Kemampuan Membayar (Ability To Pay)				Total		Uji Statistik
	Tidak mampu		Mampu				
	n	%	n	%	N	%	
Tinggi	2	3.8%	51	96.2%	53	100	p=0,000
Rendah	20	42.6%	27	57.4%	47	100	
Total	22	22.0%	78	78.0%	100	100	

Sumber : Data Primer 2023

2. Analisis hubungan Jumlah anggota keluarga terhadap Kemampuan Membayar (Ability To Pay)

Berdasarkan tabel 5.14 tentang hubungan jumlah anggota keluarga terhadap kemampuan membayar (ability to pay) iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri di Kota Palopo, diketahui bahwa dari 78 responden yang memiliki kemampuan untuk membayar iuran BPJS pada variabel jumlah anggota keluarga paling sedikit yaitu 25 responden atau setara dengan 62.5% dan yang memiliki jumlah anggota keluarga terbanyak yaitu 53 responden atau setara dengan 88.3 %. Sementara itu, 22 responden yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan terdapat 7 responden atau setara dengan 11.7% yang memiliki jumlah anggota

keluarga paling banyak dan 15 responden atau setara dengan 37.5% yang memiliki jumlah anggota keluarga paling sedikit.

Tabel 5 14
Pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap Kemampuan
membayar Masyarakat BPJS Mandiri
di Wilayah Kerja Kota Palopo

Jumlah Anggota Keluarga	Kemampuan Membayar (Ability To Pay)				Total		Uji Statistik
	Tidak Mampu		Mampu				
	n	%	n	%	N	%	
Banyak	7	11.7 %	53	88.3 %	60	100	p=0,003
Sedikit	15	37.5 %	25	62.5 %	40	100	
Total	22	22.0	78	78.0	100	100	

Sumber Data : Primer 2023

Berdasarkan nilai uji statistic chi-square, diperoleh nilai $p=0,003$ ($p=0,05$). Hal ini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Jadi, terdapat hubungan jumlah anggota keluarga terhadap kemampuan membayar (ability to pay) iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri di Kota Palopo.

3. Analisis hubungan Persepsi Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan terhadap Kemampuan Membayar (Ability To Pay)

Pada tabel 5.15 tentang hubungan persepsi mutu pelayanan kesehatan terhadap kemampuan membayar iuran (ability to pay) iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri di Kota Palopo, diketahui bahwa dari 78 responden yang memiliki kemampuan untuk membayar, terdapat 62 responden atau setara dengan 84.9% responden yang memiliki persepsi

terhadap mutu pelayanan baik dan 16 responden atau setara dengan 59.3% responden yang memiliki persepsi terhadap mutu pelayanan yang kurang baik, sementara itu sebanyak 22 responden yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan diantaranya yang memiliki persepsi baik itu sebanyak 11 responden atau setara dengan 15,1% dan yang memiliki persepsi kurang baik itu sebanyak 11 responden atau setara dengan 40.7%

Tabel 5 15
Pengaruh persepsi terhadap mutu pelayanan kesehatan
Kemampuan membayar Masyarakat BPJS Mandiri
di Wilayah Kerja Kota Palopo

Persepsi terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan	Kemampuan Membayar (Ability To Pay)				Total		Uji Statistik
	Tidak Mampu		Mampu				
	n	%	n	%	N	%	
Baik	11	15.1 %	62	84.9%	73	100%	p=0,008
Kurang Baik	11	40.7%	16	59.3%	27	100%	
Total	22	22.0%	78	78.0%	100	100	

Data primer : 2023

Berdasarkan nilai uji statistic chi-square, diperoleh nilai $p=0,008$ ($p=0,05$). Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi, terdapat tidak hubungan persepsi terhadap mutu pelayanan dengan kemampuan membayar (ability to pay) dan kemauan membayar (willingness to pay) iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri di Kota Palopo.

4. Analisis hubungan Riwayat Katastropik terhadap Kemampuan Membayar (Ability To Pay)

Berdasarkan tabel 5.16 tentang hubungan riwayat katastrofik terhadap kemampuan membayar (ability to pay) iuran BPJS Kesehatan yang memiliki kemampuan membayar diantaranya 78 responden atau setara dengan 78,0% sebanyak 63 responden yang memiliki riwayat katastrofik atau setara dengan 86.3% dan yang tidak memiliki riwayat katastrofik sebanyak 15 responden atau setara dengan 55.6%, sementara itu yang tidak memiliki kemampuan untuk itu sebanyak 22 responden atau setara dengan 22.0% yang dimana yang memiliki riwayat katastrofik itu sebanyak 10 responden atau setara dengan 13.7% dan yang tidak memiliki riwayat katastrofik sebanyak 12 responden atau setara dengan 44.4%.

Tabel 5 16
hubungan riwayat katastrofik terhadap Kemampuan membayar
Masyarakat BPJS Mandiri di Wilayah Kerja Kota Palopo

Riwayat Katastropik	Kemampuan Membayar (Ability To Pay)				Total		Uji Statistik
	Tidak Mampu		Mampu				
	n	%	n	%	N	%	
Ada	10	13.7 %	63	86.3%	73	100%	p=0,002
Tidak ada	12	44.4%	15	55.6%	27	100%	
Total	22	22.0%	78	78.0%	100	100	

Sumber Data : Primer 2023

Berdasarkan nilai uji statistic *chi-square*, diperoleh nilai $p=0,002$ ($p=0,05$). Hal ini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Jadi, terdapat riwayat

katastropik terhadap kemampuan membayar (ability to pay) iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri di Kota Palopo.

2. Hubungan WTP

1. Analisis hubungan pendapatan per-bulan terhadap Kemauan Membayar (Willingness To Pay)

Tabel 5.17
hubungan pendapatan per bulan terhadap Kemauan membayar Masyarakat BPJS Mandiri di Wilayah Kerja Kota Palopo

Pendapatan	Kemauan Membayar (Willingness To Pay)				Total		Uji Statistik
	Ya		Tidak				
	n	%	n	%	N	%	
Tinggi	10	18.9 %	43	81.1%	53	100%	p=0,001
Rendah	23	48.9%	24	51.1%	47	100%	
Total	33	33.0%	67	67.0%	100	100	

Sumber Data : Primer 2023

Berdasarkan tabel 5.17 tentang hubungan pendapatan per-bulan terhadap kemauan membayar iuran BPJS Kesehatan yang memiliki kemauan untuk membayar iuran BPJS itu sebanyak 33 responden atau setara dengan 33.0% diantara 10 responden atau setara dengan 18.9% yang memiliki pendapatan tinggi dan 23 responden atau setara dengan 48.9% yang memiliki pendapatan rendah. Sementara itu, yang tidak memiliki kemauan untuk membayar iuran BPJS sebanyak 67 responden atau setara dengan 67.0% dan 43 responden lainnya atau setara dengan 81.1% diantaranya

memiliki pendapatan tinggi dan 24 responden atau setara dengan 51.1% lainnya memiliki pendapatan rendah.

Berdasarkan nilai uji statistic *chi-square*, diperoleh nilai $p=0,001$ ($p=0,05$). Hal ini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Jadi, terdapat hubungan pendapatan per-bulan terhadap kemauan membayar (willingness to pay) iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri di Kota Palopo.

2. Analisis hubungan jumlah anggota keluarga terhadap Kemauan Membayar (Willingness To Pay)

Tabel 5.18
Hubungan jumlah anggota keluarga terhadap Kemauan membayar Masyarakat BPJS Mandiri di Wilayah Kerja Kota Palopo

Jumlah anggota keluarga	Kemauan Membayar (Willingness To Pay)				Total		Uji Statistik
	Ya		Tidak				
	n	%	n	%	N	%	
Banyak	10	16.7 %	50	83..3%	60	100%	p=0,000
Sedikit	23	57.5%	17	42.5%	40	100%	
Total	33	33.0%	67	67.0%	100	100	

Sumber Data : Primer 2023

Berdasarkan tabel 5.18 tentang hubungan jumlah anggota keluarga terhadap kemauan membayar iuran BPJS Kesehatan sebanyak 33 responden atau setara dengan 33.0% yang memiliki kemauan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan diantara 23 responden atau setara dengan

57.5% yang memiliki jumlah anggota keluarga paling sedikit dan 10 responden atau setara dengan 16.7% diantaranya yang memiliki jumlah anggota keluarga paling sedikit. Sementara itu, 67 responden atau setara dengan 67.0% yang tidak memiliki kemauan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan terdapat 50 responden atau setara dengan 83.3% yang memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak dan 17 responden atau setara dengan 42.5% yang memiliki jumlah anggota keluarga paling sedikit.

Berdasarkan nilai uji statistic *chi-square*, diperoleh nilai $p=0,000$ ($p=0,05$). Hal ini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Jadi, terdapat hubungan jumlah anggota keluarga terhadap kemauan membayar (*willingness to pay*) iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri di Kota Palopo.

3. Analisis persepsi terhadap mutu pelayanan terhadap Kemauan Membayar (Willingness To Pay)

Berdasarkan tabel 5.19 tentang persepsi terhadap mutu pelayanan kesehatan terhadap kemauan membayar iuran BPJS Kesehatan sebanyak 67 responden yang tidak memiliki kemauan untuk membayar iuran BPJS Kesehatannya, 50 responden atau setara dengan 68.5% diantaranya memiliki persepsi terhadap mutu pelayanan kesehatan baik dan 17 responden atau setara dengan 63.0% yang memiliki persepsi terhadap pelayanan kesehatan kurang baik. Sementara itu, 33 responden yang memiliki kemauan untuk membayar iuran BPJS Kesehatannya 23 responden

atau setara dengan 32.5% lainnya memiliki persepsi baik dan 10 responden atau setara dengan 37.0% memiliki persepsi kurang baik.

Tabel 5 17
Hubungan persepsi terhadap mutu pelayanan terhadap Kemauan membayar Masyarakat BPJS Mandiri di Wilayah Kerja Kota Palopo

Persepsi terhadap mutu pelayanan	Kemauan Membayar (Willingness To Pay)				Total		Uji Statistik
	Ya		Tidak				
	n	%	n	%	N	%	
Baik	23	31.5 %	50	68..5%	73	100%	p=0,384
Kurang baik	10	37.0%	17	63.0%	27	100%	
Total	33	33.0%	67	67.0%	100	100	

Sumber Data : Primer 2023

Berdasarkan nilai uji statistic *chi-square*, diperoleh nilai $p=0,384$ ($p=0,05$). Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi, terdapat tidak ada hubungan persepsi terhadap mutu pelayanan kesehatan terhadap kemauan membayar (willingness to pay) iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri di Kota Palopo.

4. Analisis riwayat katastrofik terhadap Kemauan Membayar (Willingness To Pay)

Berdasarkan tabel 5.20 tentang hubungan riwayat katastrofik terhadap kemauan membayar iuran BPJS Kesehatan mandiri sebanyak 67 responden atau setara dengan (67.0%) yang tidak memiliki kemauan untuk membayar iuran BPJS Kesehatannya diantaranya 59 responden atau setara

dengan (80.8%) yang memiliki riwayat katastrofik dan 8 responden atau setara dengan (29.6%) yang tidak memiliki riwayat katastrofik. Sementara itu, yang memiliki kemauan untuk membayar iuran BPJS Kesehatannya itu sebanyak 33 responden atau setara dengan (33.0%) diantaranya 19 responden atau setara dengan (70.4%) yang tidak memiliki riwayat katastrofik dan 14 responden atau setara dengan (19.2%) yang memiliki riwayat katastrofik.

Tabel 5 18
Hubungan riwayat katastrofik pelayanan terhadap Kemauan
membayar Masyarakat BPJS Mandiri
di Wilayah Kerja Kota Palopo

Riwayat Katastropik	Kemauan Membayar (Willingness To Pay)				Total		Uji Statistik
	Ya		Tidak				
	n	%	n	%	N	%	
Tidak ada	19	70.4 %	8	29..6%	27	100%	p=0,000
Ada	14	19.2%	59	80.8%	73	100%	
Total	33	33.0%	67	67.0%	100	100	

Sumber Data : Primer 2023

Berdasarkan nilai uji statistic *chi-square*, diperoleh nilai $p=0,000$ ($p=0,05$). Hal ini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Jadi, terdapat hubungan riwayat katastrofik dengan kemauan membayar (willingness to pay) iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri di Kota Palopo.

C. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

Karakteristik dalam penelitian ini meliputi umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan terakhir.

Dari hasil penelitian jika ditinjau dari kelompok umur yang terbanyak berada pada kelompok umur 26 – 45 atau berada pada usia dewasa sebanyak 71 responden (71%), dan responden paling sedikit berada pada usia 17-25 tahun sebanyak 3 (3%) atau berada pada usia remaja akhir menurut departemen kesehatan 2009. Berdasarkan hal diatas peneliti menyatakan bahwa umur sangat berpengaruh dalam penentuan pemilihan jenis jaminan kesehatan, apabila seseorang memiliki umur yang muda maka semakin teliti dan penuh pertimbangan mereka dalam pemilihan jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan, sedangkan semakin bertambah umur seseorang tingkat produktivitas seseorang menurun dan hal tersebut sangat mempengaruhi.

Dalam penentuan pemilihan jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan dalam penelitian ini terdapat 83 responden berjenis kelamin perempuan dan 17 responden berjenis kelamin laki-laki hal tersebut disebabkan mayoritas perempuan yang lebih peduli terhadap pelayanan kesehatan yang baik untuk diri sendir maupun keluarga. menurut penelitian Lofgren 2008 bahwa perempuan cenderung memiliki tingkat kemauan membayar iuran yang positif dibandingkan laki-laki, serta perempuan memiliki

derajat ketidakmauan menerima resiko dan persepsi yang lebih besar disbanding laki-laki(Rofiatin & Bariska,2018)

Masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan dapat dilihat dari karakteristik pekerjaan seseorang yang dimana pada penelitian ini sebanyak 45 responden (45%) yang bekerja sebagai karyawan swasta, sebanyak 27 responden memiliki pekerjaan sebagai pedagang atau wiraswasta, dan yang paling sedikit 7 respondeen (7%) adalah dan lain-lain dimana pekerjaan ini ada pelaut, buruh dan ojol. Pekerjaan secara tidak langsung mempengaruhi untuk menunjang pembayaran kelas rawatan iuran BPJS Kesehatan.

Pendidikan responden terbanyak adalah SMA sebanyak 39 responden (39%) dan D3/S1 sebanyak 28 responden (28%) jika di jumlahkan semua terdapat 67 reponden yang memiliki pendidikan yang cukup baik hal tersebut secara tidak langsung sangat berpengaruh pada pemahaman masyarakat terkait kemampuan dan kemauan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.

1. Hubungan Pendapatan per bulan terhadap kemampuan membayar (Ability To Pay) dan Kemauan Membayar (Willingness To Pay) dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.

Hubungan antara pendapatan per bulan dengan Kemampuan membayar (Ability To Pay) iuran BPJS uji statistik $p=0,000$ hal tersebut menandakan bahwa terdapat hubungan. Hal ini mendasar pada teori Russel

(1995) yang menyatakan bahwa Ability to pay berhubungan dengan tingkat pendapatan (income) dan menurut Gertlet (1990) bahwa pendapatan dapat mempengaruhi penentuan pasien dalam memilih pengobatan yang dapat memaksimalkan kepuasan dan manfaat (utility) yang di peroleh (fauziyyah,2016). Teori ini sesuai dengan hasil penelitian ini yaitu berdasarkan hasil survey dilapangan menunjukkan bahwa frekuensi tingkat pendapatan masyarakat tinggi sebanyak 53 responden hal tersebut juga dipengaruhi oleh pendidikan responden yang mayoritas tinggi, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi kemampuan dan kemauan masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.

Hasil uji statistic pada kemauan membayar (Willingness To Pay) iuran BPJS Kesehatan dapat dilihat bahwa $p=0,001$ yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pendapatan per bulan dengan kemauan membayar (Willingness To Pay) iuran BPJS Kesehatan dapat dilihat pada pendapatan yang berpengaruh pada tingkat pekerjaan seseorang yang dimana pada penelitian ini kebanyakan pekerjaan masyarakat itu karyawan swasta sebanyak 45 responden hal tersebut sangat berpengaruh dikarenakan masyarakat memiliki pendapatan tetap setiap bulannya sehingga memiliki tingkat kemauan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan tinggi. Menurut Permata (2012) faktor yang mempengaruhi Kemauan membayar dalam pembiayaan jaminan kesehatan yang menyatakan bahwa bila seseorang

memiliki penghasilan besar maka kemauan membayar iuran JKN semakin besar sehingga partisipasi masyarakat dalam JKN akan tinggi.

Pada penelitian ini tingkat kemauan masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatannya dipengaruhi oleh letak geografis dalam pengambilan sampel penelitian berada ditengah Kota Palopo yang dimana hampir seluruh masyarakatnya memiliki pekerjaan tetap. Persepsi ini didukung oleh teori Notoatmojo,2010 bahwa pekerjaan ialah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memperoleh penghasilan. Jenis pekerjaan seseorang berhubungan dengan tingkat pendapatan yang dihasilkan. Hasil yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satunya ialah menyisihkan penghasilan tersebut untuk membayar iuran asuransi kesehatan (Anggriawan, 2017). Pendapatan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai total penghasilan yang didapatkan responden selama satu bulan, yang dimana pengkategorian pendapatan didasarkan pada UMR (Upah Minimum Regional) tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 3.529.100,- per bulan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh mudayana yang menyatakan bahwa pendapatan keluarga mempengaruhi kemampuan dan kemauan membayar jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan, dan jika pendapatan pasien masih kurang maka mereka menganggap bahwa mereka tidak mampu membayar jasa pelayanan kesehatan.(Kusuma, 2016)

2. Hubungan Jumlah Anggota Keluarga terhadap kemampuan membayar (*Ability To Pay*) dan Kemauan Membayar (*Willingness To Pay*) dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.

Berdasarkan uji statistik $p=0,003$ hal tersebut menandakan bahwa terdapat hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan Kemampuan membayar (*Ability To Pay*) iuran BPJS diketahui dari Jumlah anggota keluarga sangat berperan penting dimana semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin banyak pula kebutuhan dalam memenuhi kesehatannya. Secara otomatis semakin meningkat pula alokasi dana dari penghasilan keluarga per bulan yang harus disediakan untuk biaya kesehatan keluarga. Jumlah anggota keluarga menjadi bagian penting dalam kemampuan pasien dalam membayar iuran JKN, dikarenakan seluruh anggota keluarga wajib menjadi peserta JKN, maka jumlah pengeluaran di dalam rumah tangga semakin meningkat. Berdasarkan fakta dilapangan banyak masyarakat merasa tertolong dengan adanya BPJS Kesehatan ini dimana mereka merasa bahwa dengan adanya BPJS Kesehatan ini mereka dengan mudah mengakses layanan kesehatan daripada mereka harus menggunakan pelayanan umum yang lebih membutuhkan dana besar apalagi yang mereka memiliki riwayat katastropik. Penelitian Ini tidak sesuai dengan teori Lofgren dkk (2008:16), jumlah anggota keluarga mempengaruhi persepsi kepala keluarga terhadap resiko dan persepsi terhadap besarnya kerugian. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, semakin besar risiko,

dan semakin besar kerugian finansial yang akan dialami. Teori ini terbukti pada penelitian Woldemariam di Ethiopia dan Masanjala-Phiri di Malawi. Babatunde dkk membuktikan sebaliknya. Semakin besar jumlah anggota semakin menurunkan kemauan, karena jumlah iuran harus dibayar semakin besar. (Sihaloho, 2015)

Hasil uji statistic pada hubungan jumlah anggota keluarga terhadap kemauan membayar iuran BPJS dapat dilihat pada $p=0,000$ yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara jumlah anggota keluarga terhadap kemauan membayar di ketahui bahwa banyaknya responden memiliki jumlah anggota keluarga lebih banyak karna mereka tidak dapat mengetahui kapan mereka akan terjaring penyakit sehingga menunjukkan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga maka semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar. Karena jika mereka tidak menggunakan Jaminan sosial atau BPJS dalam pelayanan kesehatan maka hal tersebut lebih membutuhkann dana yang besar. Maka hal ini perlu menjadi perhatian kita semua untuk menjaga dan mengatur kestabilan alokasi dana untuk kesehatan agar anggota keluarga kita mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Menurut Jacobs (1997) bahwa faktor ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemauan membayar seseorang salah satunya ialah dengan adanya *saving money* untuk pelayanan kesehatan. Dan Djuhaeni (2010) mengatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki *saving*

money untuk kesehatan artinya belum mempersiapkan sejumlah dana yang digunakan untuk menghadapi masalah kesehatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Andi Nurhildayanti,2020) yang menyatakan bahwa jumlah anggota memengaruhi persepsi kepala keluarga terhadap risiko dan persepsi terhadap besarnya kerugian. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, semakin besar risiko sakit, dan semakin besar kerugian finansial yang akan dialami.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Natasya Febrianti,2022) yang menyatakan bahwa Semakin banyak jumlah anggota keluarga, akan semakin banyak pula alokasi dana dari penghasilan keluarga perbulan yang harus disediakan untuk kesehatan keluarga.(Rusydi et al., 2022)

3. Hubungan persepsi mutu pelayanan kesehatan terhadap kemampuan membayar (*Ability To Pay*) dan Kemauan Membayar (*Willingness To Pay*) dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.

Berdasarkan uji statistik $p = 0,008$. Hal tersebut menandakan tidak ada hubungan persepsi mutu pelayanan kesehatan terhadap kemampuan membayar iuran (*ability to pay*) iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri di Kota Palopo, pada penelitian ini walaupun persepsi masyarakat tidak baik bahkan kesan pertama masyarakat dalam pengguna layanan kesehatan tetap masyarakat harus memiliki kemauan untuk membayar iuran BPJS Kesehatannya dikarenakan jika suatu saat masyarakat jatuh sakit sementara BPJS Kesehatannya sedang non-aktif maka layanan kesehatannya berubah

menjadi umum, walaupun sudah di aktifkan pada saat jatuh sakit tapi masa pengaktifan BPJS Kesehatan itu membutuhkan waktu 15 hari kerja dan bagaimana pun tetap harus menggunakan layanan umum yang lebih membutuhkan dana yang besar daripada harus membayar iuran BPJS Kesehatan tiap bulannya hal tersebut mengharuskan masyarakat memiliki kemampuan untuk membayar iuran BPJSnya.

Menurut Jones (2007) mengelompokkan dimensi dari kesetiaan pelanggan pada layanan menjadi sepuluh indikator dan salah satunya adalah keinginan membayar, sedangkan mutu layanan berhubungan dengan kesetiaan pelanggan pada layanan. Jadi mutu layanan yang baik akan meningkatkan keinginan membayar pelanggan atas layanan yang diterimanya.

Sedangkan uji statistic pada kemauan membayar (willingness to pay) iuran BPJS Kesehatannya dapat dilihat bahwa $\rho = 0,384$. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pemilihan tempat pelayanan kesehatan pengguna BPJS mandiri ditentukan oleh individu itu sendiri atau wilayah tempat tinggal yang memiliki fasilitas kesehatan terdekat, maka hal tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi mutu pelayanan kesehatan terhadap kemauan masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan karna hal tersebut menjadi pilihan peserta mandiri sebelum mendaftarkan diri ke BPJS jadi walaupun masyarakat lain menyatakan bahwa tempat tersebut memiliki layanan kesehatan kurang bagus atau sarana dan prasarana di

fasilitas kesehatan tersebut kurang memadai sekiranya hal tersebut sudah menjadi pertimbangan masyarakat sebelum menentukan tempat fasilitas layanan BPJS Kesehatan jadi hal tersebut tidak mengurangi kemauan masyarakat dalam membayar iuran BPJSnya.

Pada teori utilitas pelayanan kesehatan yang menjelaskan bahwa keinginan seseorang untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan juga ditentukan oleh faktor pendukung yakni salah satunya adalah jarak atau aksesibilitas layanan kesehatan. Dengan kondisi jalan yang buruk dan sulitnya akses ke pelayanan kesehatan membuat seseorang tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut. Beda halnya dengan teori Health Belief Model yang menyatakan bahwa dalam faktor struktur yang berkaitan dengan akses ke pelayanan kesehatan akan cenderung mempengaruhi seseorang untuk memanfaatkan atau tidak pelayanan kesehatan (Cahyani et al., 2021)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jannah et al., 2022) yang menyatakan tidak ada hubungan antara persepsi dengan kepatuhan masyarakat membayar iuran BPJS Kesehatan dengan nilai $p = 0,040$ ($p < 0,05$). bahwa mayoritas masyarakat menganggap BPJS Kesehatan sangat bermanfaat bagi mereka terutama yang membutuhkan perawatan inap dengan penyakit parah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Nurhildayati yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pelayanan

kesehatan dengan kemauan (ATP) dan kemampuan (WTP) membayar dengan nilai $p=0,000 < \alpha=0,05$. Ada beberapa responden yang menilai dalam memberikan pelayanan kesehatan petugas tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan keadaan pasien serta biaya yang dipungut tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini tentu saja pelayanan kesehatan harus menjelaskan kepada pasien bahwa tidak semua pengobatan mendapatkan rujukan lanjutan dan jika hendak berobat tentunya sesuai dengan fasilitas kesehatan yang terdaftar.

4. Hubungan riwayat katastrofik terhadap kemampuan membayar (Ability To Pay) dan Kemauan Membayar (Willingness To Pay) dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hasil uji *chi-square* $p=0,002$. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat hubungan riwayat katastrofik terhadap kemampuan membayar (ability to pay) iuran BPJS Kesehatan karena pada karakteristik responden pada umur, sebanyak 26 responden lebih dari usia 45 tahun umur tersebut tergolong usia lansia yang dimana mereka rentan terkena penyakit, bahkan pada umur 26-45 tahun pun sudah ada beberapa yang memiliki riwayat katastrofik, berdasarkan pengamatan peneliti hal tersebut terjadi karena *lifestyle* masyarakat sekarang sudah tidak terjaga, selalu ingin menciptakan hal baru seperti sekarang yang lagi trend yaitu brokoli goreng, kol goreng padahal makanan tersebut termasuk makanan yang kaya

akan antioksidan yang bisa membantu meningkatkan sistem imunitas tubuh tapi karna diolah menjadi gorengan sehingga mengurangi manfaatnya dan mengkonsumsi gorengan kol dan brokoli secara berlebih sangat rentan terhadap penyakit kanker dan rentan terhadap stroke.

Sedangkan hasil uji statistic pada kemauan membayar (*Willingness To Pay*) iuran BPJS Kesehatan dapat lihat bahwa $p=0,000$ yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara riwayat katastrofik terhadap kemauan membayar iuran BPJS Kesehatan mandiri, berdasarkan pengamatan peneliti riwayat katastrofik atau penyakit tertentu baik yang diderita sendiri ataupun oleh anggota keluarga akan mempengaruhi sikap masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Dari penelitian ini diketahui bahwa rata-rata masyarakat yang merupakan peserta mandiri BPJS Kesehatan yang memiliki penyakit katastrofik seperti penyakit stroke, hipertensi dan diabetes melitus yang diderita sendiri maupun yang diderita oleh anggota keluarganya. Hal tersebut tetap masyarakat memiliki kemauan membayar iuran BPJS Kesehatan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat agar mengurangi beban biaya terhadap risiko penyakit yang dimilikinya. menurut teori Lawrence Green (1980) dalam (Notoatmojo 2012) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dari tingkat kesehatan yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung dan faktor pendorong, riwayat katastrofik ini termasuk dalam faktor pendorong dimana terwujud

dalam sikap atau perilaku petugas kesehatan atau petugas lain yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat (Faradiba Anggraeni, 2020)

Riwayat katastrofik dalam penelitian ini didefinisikan sebagai ada tidaknya riwayat pengalaman penyakit berbiaya tinggi dan secara komplikasi dapat membahayakan jiwa pada responden maupun pada keluarga responden. Pengkategorian riwayat dibagi menjadi dua yaitu ada riwayat dan tidak adariwayat..

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh (Miftahul Jannah 2022) yang menyatakan berdasarkan nilai uji chi square diperoleh nilai $p = 0,083$ ($p > 0,05$) sehingga H_a diterima yang artinya tidak ada hubungan antara riwayat penyakit dengan kepatuhan Masyarakat membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Wawondula. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat tidak memiliki penyakit yang membutuhkan pengobatan rutin.